

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyuluh kehutanan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan kehutanan di Indonesia. Penyuluh kehutanan berperan dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar masyarakat turut mendukung pembangunan kehutanan di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa penyuluh kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengamanatkan bahwa pembangunan kehutanan harus menitikberatkan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyuluh kehutanan kini telah mengalami pergeseran paradigma. Penyuluhan kehutanan kini telah bergeser dari penyuluhan kehutanan yang menekankan proses transfer teknologi dan informasi ke arah penyuluhan kehutanan yang

berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan bertujuan memandirikan masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraannya. Sehingga apabila masyarakat sudah memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan perekonomian masyarakat sudah baik, maka masyarakat akan ikut serta dalam mendukung pembangunan kehutanan.

Penyuluh kehutanan harus bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal agar tercapainya tujuan dari penyuluhan kehutanan itu sendiri yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia, namun demikian masih ada penyuluh kehutanan yang kinerjanya belum memuaskan. Keadaan tersebut dikarenakan penyuluh kehutanan belum melaksanakan peranan dan fungsinya secara maksimal, hal itu diakibatkan oleh banyak faktor salah satunya adalah kurangnya sarana dan prasarana. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

“Peranan dan fungsi penyuluh di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dapat dikatakan belum maksimal. Ini diakibatkan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi penyuluh dalam kegiatan penyuluhan adalah kurangnya sarana dan prasarana, informasi penyuluh dan sulitnya mengumpulkan petani”.

(Berdasarkan penelitian Muhsin dalam bentuk jurnal, 2011:63).

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan buruknya kinerja penyuluh kehutanan dalam menjalankan tugasnya. Faktor lain yang menyebabkan buruknya kinerja penyuluh kehutanan adalah rendahnya kemampuan dan kompetensi dari penyuluh. Seperti penjelasan di bawah ini:

“Hasil monitoring dan evaluasi (monev) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman penyuluh kehutanan terhadap peraturan, juklak, dan juknis kegiatan teknis kehutanan masih termasuk rendah atau rata-rata sebesar 37%. Sampel diambil terhadap 46 orang penyuluh kehutanan di kabupaten dan UPT PHKA di 6 provinsi (Riau, Kalsel, Lampung, DIY, Sulsel dan Bali). Komposisi sampel penyuluh kehutanan yaitu dari UPT PHKA (5 orang), Bakorluh/Dishut Provinsi (12 orang) dan Bapeluh/Dishut Kabupaten (29 orang).”
(<http://www.bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php/umum/8-siapkah-penyuluh-kehutanan-mendampingi-kegiatan-kehutanan-di-lapangan.html> di akses pada 17 April 2015 Pukul 14.53 WIB)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kemampuan dan kompetensi penyuluh kehutanan dalam memahami tupoksinya sangat diperlukan. Karena tupoksi tersebut akan dijadikan landasan dalam menyusun seluruh agenda dan program-program yang akan dijalankan oleh penyuluh, apabila penyuluh tidak dapat memahami tupoksinya dengan baik, maka pemberdayaan masyarakat tidak akan dapat tercapai.

Pemberdayaan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila penyuluh kehutanan menjalankan tupoksinya dengan baik dan juga didukung oleh berbagai macam faktor pendukung, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik karena banyaknya faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Seperti halnya pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Desa Tunggul Boyok Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

“Faktor- faktor penghambat pemberdayaan masyarakat berupa: kondisi jalan yang belum memadai, perladangan berpindah yang masih dilakukan sebagian masyarakat, letak desa di dalam kawasan hutan, kurangnya tenaga penyuluh kehutanan di Kabupaten Sanggau, dan adanya kebijakan pemerintah di era otonomi yang tidak menjadikan program penyuluhan kehutanan sebagai prioritas bagi pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan”.

(Berdasarkan penelitian Iskandar dkk dalam bentuk jurnal tesis 2013: 1)

Dari keterangan di atas ternyata banyak faktor yang menghambat terlaksananya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu program pemberdayaan masyarakat ini harus melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada mulai dari pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah, pihak swasta, dan juga masyarakat. Apabila kegiatan pemberdayaan masyarakat ini hanya dibebankan kepada penyuluh saja tentu tidak akan memberikan hasil yang maksimal.

Buruknya kinerja penyuluh kehutanan di beberapa tempat yang telah disebutkan di atas tidak berarti bahwa seluruh penyuluh kehutanan tidak berhasil dalam menjalankan tugasnya. Ada beberapa daerah di Indonesia dimana penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat memperoleh hasil yang menggembirakan. Salah satu contohnya adalah penyuluhan yang dilakukan di Desa Galungan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, seperti keterangan di bawah ini.

“Kegiatan pemberdayaan masyarakat di KPH Bali Tengah dilaksanakan oleh BUMDes Wana Amerta melalui UPT Kehutanannya. UPT kehutanannya inilah yang bekerja sama dengan penyuluh kehutanannya dan KPH Bali Tengah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa Galungan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan UPT kehutanannya dan penyuluh kehutanannya beserta KPH Bali Tengah adalah pengembangan ekowisata berupa *jogging track* ke Bukit Catu yang merupakan bagian dari hutan Desa. Meski belum beroperasi penuh seperti yang direncanakan, kegiatan tersebut telah mulai memberikan peluang bagi masyarakat sekitar untuk berusaha dalam bidang penjualan makanan dan penyediaan lahan parkir. Diharapkan, ekowisata Bukit Catu dan kegiatan pembangunan kehutanannya lainnya oleh BUMDes Wana Amerta ini terus berkembang dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan dengan dukungan dari para pihak terkait termasuk KPH, Pemerintah Kabupaten dan pihak lainnya”

(<http://www.bp2sdmk.dephut.go.id/index.php/berita/290-sukses-kolaborasi-antara-penyuluh-kth-dan-kph-bali-tengah-dalam-pemberdayaan-masyarakat> di akses pada 18 April 2015 Pukul 06.41 WIB)

Kegiatan penyuluh kehutanannya di Desa Galungan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng ini seharusnya dijadikan contoh oleh penyuluh kehutanannya di daerah-daerah lain di Indonesia, dimana penyuluhan yang dilakukan di Desa Galungan tersebut tidak hanya sekedar menyampaikan informasi tentang pelarangan penebangan pohon tetapi juga memberikan solusi kepada masyarakat yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat. Sehingga penyuluhan yang dilakukan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada disekitar hutan.

Jika penyuluh kehutanan di Desa Galungan berhasil lalu apakah kegiatan penyuluh kehutanan di daerah lain juga memberikan hasil yang maksimal. Seperti penyuluh kehutanan di Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Badan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bengkunt (SPTN II Bengkunt). Apakah penyuluh kehutanan di SPTN II Bengkunt ini bisa menjalankan tupoksinya secara maksimal sehingga mencapai kinerja yang memuaskan.

Badan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bengkunt (SPTN II Bengkunt) merupakan badan yang didirikan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Bentang alam (*Landscape*) Bukit Barisan Selatan berpusat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di ujung selatan pulau Sumatera Indonesia. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan kawasan lindung terbesar ketiga (3.560 km²) di Sumatera dan memanjang 150 km sepanjang Pegunungan Barisan (4⁰ 31' -5⁰ 57' S dan 103⁰ 34' -104⁰ 43 E) mencakup dua provinsi di Sumatera yaitu Lampung dan Bengkulu. Taman ini didirikan pada tahun 1982 meskipun telah ditetapkan sebagai cagar alam sejak 1932. (Rencana Kerja Tahunan *Wildlife Conservation Society Indonesia Program* (RKT WCS-IP) di Balai TNBBS 2014).

Penyuluh kehutanan di SPTN II Bengkunt telah menjalankan program pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) hal ini terbukti dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh penyuluh SPTN II Bengkunt. Kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh penyuluh tersebut belum berjalan secara maksimal. Karena kelompok-kelompok masyarakat tersebut hanya sekedar didirikan saja tanpa memiliki kegiatan serta program-program kerja yang jelas.

Kurangnya peran dari penyuluh SPTN II Bengkunt ini disebabkan oleh berbagai macam faktor salah satunya adalah sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitar kawasan taman nasional. Selain itu jumlah tenaga penyuluh yang tidak memadai juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya peran penyuluh dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan serta permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Kinerja Penyuluh Badan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bengkunt (SPTN II Bengkunt) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan penjelasan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah Kinerja Penyuluh Badan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bengkunt (SPTN II Bengkunt) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja yang dilakukan oleh Penyuluh Badan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bengkunt (SPTN II Bengkunt) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan”.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pemerintahan, serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan dalam menganalisis Kinerja Penyuluh Badan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bengkunt (SPTN IIBengkunt) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Badan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bengkunt (SPTN II Bengkunt) dalam menangani langsung masalah Kinerja Penyuluh Badan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bengkunt (SPTN II Bengkunt) dalam Menjaga Kelestarian Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).